



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Penelitian yang dilakukan oleh Adhgha Nidzar Zulkifli yang berjudul “Refleksi 21 Tahun AFTA dan Tantangan Commodity Bust” dalam jurnal penelitian terbitan Univeritas Airlangga, ini penulis melihat bahwa AFTA sebagai tantangan dalam menghadapi persaingan pasar bebas di asia tenggara. Adapun Ekspor intra-ASEAN, walaupun naik drastis, secara persentase besarnya masih stagnan bila dibandingkan dengan total ekspor negara–negara ASEAN. Begitu juga dalam kasus Indonesia, yang bahkan total ekspornya ke ASEAN berbanding total ekspornya ke seluruh dunia secara persentase selalu lebih rendah ketimbang persentase total ekspor intraASEAN berbanding total ekspor negara–negara ASEAN. Bukan hanya diversifikasi tidak berjalan optimal bilamana dipandang dari dimensi tujuan ekspor, dipandang dari tipe komoditas yang diekspor pun kesimpulan yang sama juga dapat ditarik. Persentase ekspor komoditas primer intra-ASEAN berbanding total ekspor intra-ASEAN meningkat cukup tinggi. Sedangkan ketergantungan yang lebih parah dapat dilihat di Indonesia, yang pada puncaknya di tahun 2011, 60 persen ekspornya di ASEAN berwujud komoditas primer. Tentu ini perkembangan yang tidak menggembirakan terlebih bila disandingkan dengan fenomena commodity bust yang sedang terjadi.

Poin–poin ini selayaknya dapat menjadi pertimbangan dalam upaya untuk membangun rezim perdagangan bebas di ASEAN. Berbagai kebijakan tentu dapat disusun untuk mengarahkan perdagangan bebas yang ada di kawasan ke arah yang lebih bersahabat dengan upaya diversifikasi yang sebenarnya menjadi tujuan dasar

perdagangan bebas tersebut. Evaluasi juga selayaknya dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang kini telah berlaku. Studi Okabe dan Urata (2013), sebagai contoh, sebenarnya menunjukkan bahwa berbagai komoditas non-primer telah mengalami pengurangan tarif yang cukup tinggi sejak diberlakukannya AFTA. Minuman olahan, mesin, barang manufaktur, dan barang kimia masing-masing mengalami pengurangan tarif terbesar pertama, keempat, kelima, dan ketujuh dibandingkan dengan seluruh kategori komoditas lain. Namun di lain sisi hal ini ternyata belum cukup untuk menghadang kian besarnya dominasi barang non-manufaktur.

Selanjutnya penelitian tentang “Analisis daya saing dan strategi industry nasional di era masyarakat ekonomi asean dan perdagangan bebas”. Yang ditulis oleh Masagus M. Ridhwan dkk dalam jurnal nasional. Tulisan ini berkonsentrasi pada perdagangan internasional Indonesia dan daya saing termasuk faktor pendukung yang berkontribusi terhadap kinerja perdagangan tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan, daya saing produk manufaktur domestik, khususnya yang berbasis teknologi menengah dan tinggi, relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara peers di ASEAN (Singapura, Malaysia dan Thailand) dan extra ASEAN khususnya Tiongkok. Sementara daya saing produk yang berbasis teknologi rendah hingga saat ini masih cukup baik meskipun ke depan akan semakin berkompetisi ketat dengan Vietnam khususnya. Struktur ekspor industri nasional juga masih sangat berorientasi resource based dengan nilai tambah rendah. Hasil studi ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing dimaksud terutama berkaitan erat dengan faktor kapabilitas domestik khususnya masalah skill set dan ketenagakerjaan, logistik, kebijakan,

dan institusi domestik yang kurang kondusif serta kurangnya dukungan akses pasar. Untuk itu, strategi nasional perlu diarahkan untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan (upgrading) dan deepening industri, penciptaan nilai tambah domestik, serta pewujudan Indonesia sebagai basis produksi (hub) yang berorientasi ekspor. Dengan demikian, rekomendasi strategi kebijakan (dengan semangat reformasi) yang perlu dilakukan meliputi aspek industri, investasi, dan perdagangan yang bertumpu pada tujuh aspek, yaitu i) faktor institusi dan leadership, ii) skema insentif trade and investment, iii) faktor sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan, iv) infrastruktur, v) efisiensi teknis dan business services, vi) akses pembiayaan, serta vii) akses pasar.

Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Bambang Irawan dalam jurnal pertanian yang ditulis berjudul “Agribisnis Hortikultura: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Perdagangan Bebas” tulisan ini banyak menerangkan tentang Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi konsumsi per kapita sayuran dan buah mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Di pasar dunia perdagangan bahan pangan juga semakin bergeser pada produk hortikultura akibat terjadinya pergeseran preferensi konsumen yang semakin menghindari bahan pangan berkolesterol tinggi. Kedua kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa pasar produk hortikultura akan semakin besar di masa yang akan datang, baik di pasar domestik maupun di pasar dunia. Sejalan dengan liberalisasi perdagangan peluang pasar tersebut akan semakin terbuka bagi negaranegara eksportir akibat dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara sesuai dengan kesepakatan GATT. Dalam perdagangan produk hortikultura Indonesia dan

negara berkembang lain umumnya mengekspor produk bernilai tambah rendah dan mengimpor produk bernilai tambah tinggi, sebaliknya untuk negara maju. Dalam perdagangan tersebut Indonesia mengalami surplus perdagangan, terutama akibat surplus perdagangan buah-buahan. Selama 1980-1999 surplus perdagangan tersebut terus mengalami penurunan karena Indonesia semakin kalah bersaing dengan negara eksportir lain, terutama negara berkembang di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Pada 1995-1999 perdagangan sayuran bahkan mengalami defisit yang relatif besar dimana nilai impor sayuran sekitar 4 kali nilai ekspor, sedangkan kuantitas impor sekitar 2.5 kali kuantitas ekspor. Kondisi demikian pada dasarnya disebabkan oleh turunnya produksi sayuran domestik sehingga kuantitas impor sayuran pada periode tersebut naik sekitar 32 persen per tahun sedangkan kuantitas ekspor turun sebesar 18 persen per tahun. Sedangkan penurunan produksi dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) anomali iklim El Nino 1997 yang berdampak pada penurunan produksi sayuran dan buahbuahan sebesar 20.3 persen dan 11.5 persen, dan (2) kebijakan penyaluran kredit hortikultura secara berlebihan yang berdampak pada kelebihan produksi sehingga menimbulkan penurunan tajam harga sayuran.

| NO | Jurnal   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1  | Refleksi 21 Tahun AFTA dan Tantangan Commodity Bust                          | Pada jurnal ini Membahas tentang AFTA dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari Program Internasional tersebut | Peran AFTA dalam perdagangan Internasional di dalam AFTA khususnya |
| 2  | Analisis daya saing dan strategi industry nasional di era masyarakat ekonomi | Persamaan cara pengambilan kebijakan yang diambil guna  | Tidak banyak menyingkung   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | asean dan perdagangan bebas  | memanfaatkan kondisi globalisasi khususnya di ASEAN  | tentang kebijakan dalam negeri ,tetapi focus kedalam program AFTA.  |
| 3 | Agrobisnis Hortikultura: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Perdagangan Bebas | Komoditas Hortikultura merupakan komoditas strategis guna pencapaian kepentingan nasional. | AFTA menjadi pembeda dalam kajian ini, dikarenakan focus dalam kajian ASEAN tidak ke pasar Internasional. |

Ketiga penelitian tersebut belum menganalisis lebih jauh bagaimana sebenarnya Peran ASEAN FREE TRADE AREA menjadi salah satu pendorong meningkatnya penjualan komoditas hortikultura indonesia. Oleh karena itu, penulis merencanakan penelitian skripsi tersebut dengan judul **“PENGARUH ASEAN FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA INDONESIA DI PASAR BEBAS ASIA TENGGARA”**

## 2.2 Kerangka Teoritis

Penulis menggunakan suatu kerangka pemikiran yang berisi teori-teori dan konsep-konsep yang biasa digunakan oleh para ahli yang relevan dengan objek yang diteliti. Hal ini digunakan untuk memberikan *basic* pemikiran yang kuat

dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenarannya dalam mendukung hipotesis.

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi atau istilah konsep berfungsi untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, hal-hal maupun gejala-gejala sosial yang digunakan agar orang lain yang membacanya dapat segera memahami maksudnya sesuai dengan keinginan penulis memakai konsep tersebut (Mardalis, 2000, hlm 45-45). Dalam hal ini, seseorang tidak hanya memahami makna atau pengertian konsep-konsep yang telah diketahuinya, tetapi juga menggunakannya sebagai acuan ketika ia hendak mencerna sesuatu objek atau subjek yang berkaitan dengan konsep tadi (Faisal, 1999, hlm 2) Dengan demikian penuturan konsep atau definisi istilah tersebut akan memperlancar komunikasi antara penulis dengan pembaca yang ingin mengetahui isi tulisan/ skripsi tersebut.

Hubungan antarbangsa sudah lama terjadi dan berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat antarbangsa. Hubungan tersebut awalnya berlangsung secara primitif dan kemudian berevolusi menjadi modern seperti yang kita alami sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan seperti yang Aristoteles katakan manusia juga sebagai *zoon politicon*.

Pada masa sekarang ini, dunia internasional ditandai dengan semakin meningkatnya hubungan antarnegara, sehingga melahirkan pola hubungan interdependensi yang cukup tinggi.

### 2.2.1 Kerjasama Internasional

*Dalam pandangan Liberalis, negara atau state sama seperti halnya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkebang dan kemajuan negaranya. Maka diperlukan suatu hubungan antar negara agar terjalinnya suatu kerjasama. Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional menjelaskan pemahaman mengenai kerjasama internasional, sebagai berikut :*

***“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interpedesia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai: corak dan tujuan yang sama: keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.(Koesnadi Kartasasmita.1983;83)”***

Munculnya pengelompokan kekuatan ekonomi regional seperti AFTA (Asean free trade area) yang di bentuk awalnya di singapura tahun 1992, merupakan terobosan baru di kawasan Asia Tenggara di samping EFTA di kawasan Eropa. Ini juga dilihat sebagai suatu pengelompokan didasarkan atas kerjasama ekonomi regional dan pada gilirannya akan merebak menjadi suatu kerjasama ekonomi internasional. Tentunya perkembangan kehadiran kerjasama bidang ekonomi yang bersifat regional/internasional akan memberikan dampak



terhadap tata hubungan internasional serta tata hubungan ekonomi global umumnya.

### **2.2.2 Regionalisme**

Dalam tulisan **Andrew Hurrell** yang berjudul “*The Regional Dimension in International Relations Theory*” dijelaskan bahwa **:Dalam mempelajari secara teoritis interaksi antarnegara, level analisis dalam tingkat regional seringkali dikesampingkan walaupun perkembangan regional secara substantif dirasa sangat penting.**

Kondisi tersebut dapat diubah ketika karakter pembangunan juga berubah menjadi tidak lagi menitik-beratkan pada *power* dan kepentingan masing-masing negara. Selain itu diperlukan pula adanya kategori perbedaan wilayah (*region*).

Regionalisme dianggap penting karena *region* merupakan wadah paling tepat dan paling mungkin untuk menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Menurut perspektif realis, ketidaksetaraan kekuatan (*unequal power*) dapat menciptakan logika yang tidak mendukung pasar kapitalis, oleh karena itu regionalisme digunakan untuk menciptakan kesetaraan kekuasaan. Sedangkan perspektif kontra-realisme menyatakan bahwa regionalisme merupakan sarana untuk memahami kondisi sosial-ekonomi yang berubah yang akan mengubah karakter, lingkup, dan arena kompetisi kekuasaan.

Menurut **John Ravenhill**, **region adalah daerah tempat berlangsungnya regionalisme. Region dapat berupa wilayah yang memiliki**

**batas geografis maupun sebatas konstruksi sosial yang ditentukan oleh anggotanya.**

Pada prinsipnya **Hurrell** membagi **regionalisme menjadi lima kategori, yaitu regionalisasi, kesadaran regional dan identitas, kerjasama regional antar negara, integrasi regional yang merupakan pengembangan dari negara, dan kohesi regional.**

Regionalisasi merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerap kali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisasi tidak berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun bukan sekumpulan negara dan pola regionalisasi tidak harus berdasarkan batas negara. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada *sense of belonging* atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Kerap kali regionalisme jenis ini didasari oleh persamaan identitas dan identifikasi terhadap identitas itu sendiri sehingga kerap kali menimbulkan diferensiasi dan kategorisasi. Misalnya saja penggolongan masyarakat muslim dan non-muslim, serta masyarakat Eropa dan bukan Eropa. Kerjasama regional antar negara merupakan regionalisme yang terbentuk sebagai upaya untuk merespon tantangan eksternal. Dalam regionalisme ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional. (<http://ranilukita.wordpress.com/2009/03/30/pendekatan-teoritis-dalam-menganalisis-regionalisme/>, diakses Mei 2019).

Selain itu, studi hubungan internasional kontemporer mengakui keterkaitan mutlak antara politik dan ekonomi. Juga, diakui pula bahwa perilaku

internasional bertolak dari politik domestik, dorongan ekonomi domestik, dan tujuan dari elite ekonomi dominan di negara bersangkutan.

Menurut **Robert Gilpin** dalam bukunya **Walter S. Jones**, *Logika Hubungan Internasional 2*, menyatakan bahwa ekonomi internasional:

**“Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Dilain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak hubungan kekuasaan antarkelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal-balik antara ekonomi dan politik”.** (dikutip Walter S, 1993, hlm 223-224).

Jadi, pada intinya bahwa ekonomi-politik internasional diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. (dikutip Walter S, 1993, hlm 223-224)

Menurut **Walter S. Jones** dalam bukunya *Logika Hubungan Internasional 2*, mengemukakan bahwa:

- Ada lima karakter dasar ekonomi-politik global, diantaranya:
- a. Interaksi politik dan ekonomi yang dinamis;
  - b. Pengejaran kekuasaan dan kekayaan yang berlangsung serentak;
  - c. Meleburnya daripada kekayaan dengan pihak swasta, yang lebih mengutamakan kekayaan daripada kekuasaan;
  - d. Interpedensi global, baik itu kooperatif (yang seimbang, resiprokal, atau simetris), eksploitatif (yang tidak seimbang, non-resiprokal, atau asimetris), atau provokatif (yakni yang memberi dampak internasional, atau memberi dampak domestik tanpa memberi keuntungan internasional);
  - e. Kondisi stabilitas ekonomi-politik domestik dan perubahan yang mempengaruhi cara sebuah negara memainkan perannya dalam ekonomi global. (dikutip Walter S, 1993, hlm 223-224)

### 2.2.3 Perdagangan Internasional

Dalam hal ini, AFTA merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang mengarah ke dalam perdagangan internasional dalam satu kawasan/regional.

Menurut **Sobri** dalam buku *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah dan Kebijakan*, yaitu:

**“Perdagangan internasional adalah transaksi diantara subjek ekonomi negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa dengan barang tertentu harus memperhatikan syarat-syarat *commercial diplomacy*. Hal tersebut merupakan kegiatan tersendiri yang penting dalam memberikan dasar atas pelaksanaan perdagangan internasional”.** (Sobri, 2001, hlm 2)

Suatu kerjasama yang dibentuk, tidak akan lepas dari masalah, begitu pula kerjasama yang dibentuk oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Tentunya pasti akan mengalami pasang-surut dalam mencapai tujuan dari kerjasamanya tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui dalam pengimplementasian AFTA ini. Pada dasarnya adanya perdagangan internasional dalam pencapaian tujuan nasional diupayakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat seperti yang telah dikemukakan oleh **Ricardo Smith** dan **Mill** yang dikutip dari **Budiono** dalam buku *Ekonomi Internasional* bahwa:

**“Perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan lainnya dari hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri yaitu memungkinkan suatu negara dalam memperluas pasar dari hasil produksi dalam negeri dan memperbaiki teknologi yang lebih baik keadaannya dari yang terdapat di dalam negeri”.** (Budiono, 1993, 225)

Dalam hal ini, kegiatan perdagangan internasional baik yang berada dalam lingkungan regional/internasional tidak akan lepas dari adanya mekanisme pasar.

**Pasar adalah tempat transaksi antara konsumen dan produsen. Ada tiga fungsi utama pasar; (1) mempertemukan pembeli dan penjual; (2) memfasilitasi pertukaran informasi, barang, jasa dan berbagai pembayaran**

melalui transaksi pasar; (3) menyediakan infrastruktur institusional ([fe.elcom.umy.ac.id/file.php/116/materi\\_e.../Mekanisme\\_Pasar\\_EC.pdf](http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/116/materi_e.../Mekanisme_Pasar_EC.pdf) , diakses Mei 2019).

Sementara kita tahu dalam persaingan global ini, banyak MNCs yang masuk ke berbagai negara untuk mengembangkan perusahaannya dengan cara memperluas pasar barang dan jasa dengan menanamkan modalnya (investasi).

**Multinational Corporations (MNCs) adalah suatu perusahaan yang mengontrol dan mengatur pembentukan produksi di minimal dua negara.**

(dikutip Hermawan, 2007, hlm 212)

Investasi Menurut **Reilly & Brown, Investasi adalah:**

**"Komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan aset pada waktu tertentu (2) tingkat inflasi (3) ketidakpastian penghasilan dimasa mendatang".**( <http://hamdi.wordpress.com/2007/05/23/investasi-yuuk/>., diakses Mei 2019)

Masuknya atau meluasnya MNCs didukung dengan teori neoliberalisme dimana pemerintah hanya sebagai regulator atau pemberi stimulus (baca: uang).

**"Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC".** (<http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/>, diakses Mei 2019)

Tentu saja paham di atas akan mengakibatkan rendahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional/ local. Apalagi suatu pemerintah (sebut saja: Indonesia) mempunyai tujuan atau kepentingan nasional

dalam mengembangkan perekonomiannya baik secara makro ataupun mikroekonomi.

Tujuan nasional menurut **R. Soetopo** dalam buku *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku* yang menyebutkan bahwa:

**“Tujuan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam setiap interaksi hubungan internasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini merupakan konsep umum tujuan nasional dan bersifat normatif. Pengertian lain yang bersifat deskriptif, tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”.** (Soetopo, 1997, hlm 189)

Sementara kebijakan menurut **Charles Jones** sebagai berikut:

**“...behavioral consistency and repeatitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum).**  
(<http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan/>, diakses Mei 2019).

Artinya bahwa kebijakan bersifat konsisten dan dapat dijadikan instrument dalam penerapannya terhadap sesuatu hal. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara, tujuannya untuk menciptakan pasar yang terintegrasi antara negara anggota di ASEAN dengan penduduk yang mendekati 500 juta orang. Dengan adanya AFTA

diharapkan perekonomian menjadi lebih efisien, bersaing, dan menarik bagi penanaman modal ke kawasan ini.

#### 2.2.4 Konsep Pengaruh

Tentunya AFTA mempunyai pengaruh yang besar bagi Indonesia. Pengaruh menurut **Badudu dan Zain**, “**Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan ssuatu terjadi; (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain**”

(<http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/507/bab2.pdf?sequence=4>, diakses Mei 2019). Dalam interaksinya dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi menurut **Ade Priangani dan Oman Heryaman** dalam bukunya *Kajian Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri* menyatakan bahwa **Strategi adalah seni atau ilmu untuk berkehendak**. (Ade Priangani dan Oman heryaman, 2003, hlm 10) Karena itu, strategi nasional mencakup seni perencanaan, persiapan, pengerahan dan penggunaan dana dan daya nasional (kekuatan nasional), politik, ekonomi, sosial, kulturil, moril, pskologi dan militer untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dengan cara-cara yang seefisien dan seefektif mungkin. (Ade Priangani dan Oman heryaman, 2003, hlm 27)

Pembentukan AFTA ini diawali karena adanya integrasi ekonomi dan kerjasama. Menurut **Kindleger dan Linders** (1978) seperti dikutip oleh **Koh Toh** (Esmara, 1988:151-2) ada lima bentuk integrasi yaitu:

a. *Free Trade Area* (Kawasan Perdagangan Bebas)

Kawasan perdagangan bebas adalah suatu bentuk integrasi ekonomi dimana pembatasan kuantitatif dan hambatan tarif antara negara-negara anggota

dihapuskan; dan setiap negara tetap memberlakukan sendiri-sendiri terhadap negara luar yang bukan anggota.

b. *Custom Union*

Adalah integrasi ekonomi dimana tarif antara negara anggota dihapuskan dan “tarif bersama eksternal” (*common external tariff*) tetap diberlakukan terhadap negara bukan anggota.

c. *Common Market* (Pasar Bersama)

Adalah bentuk integrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri custom union plus penghapusan pembatasan perdagangan dan penghapusan pembatasan lalu lintas faktor-faktor produksi antarnegara anggota.

d. *Economic Union* (Uni atau Kesatuan Ekonomi)

Adalah satu bentuk integrasi disamping memiliki ciri-ciri pasar bersama juga ada penyeragaman kebijakan ekonomi dan sosial.

e. *Supranational Union* (Uni Supranasional)

Adalah suatu bentuk integrasi ekonomi dimana pemerintahan nasional menyerahkan kekuasaan atau sovereignty kebijaksanaan ekonomi dan sosial kepada otoritas supranasional (Diby, Prabowo dan Sonia, Wardoyo, 2004, hlm 7-8). ASEAN Free Trade Area dalam aturan utamanya memberlakukan skema tarif *CEPT* (*Common Effective Preferential tariff*) yang merupakan mekanisme untuk mencapai AFTA. Isinya merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA (Diby, Prabowo dan Sonia, Wardoyo, 2004, hlm 20).



Tentunya dengan adanya AFTA ini, semua negara anggota mempunyai kepentingan nasional yang sama, terutama dalam mengembangkan ekonomi nasional.

Menurut **Subandi** dalam bukunya *Sistem Ekonomi Indonesia*, menyatakan bahwa: **sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa/negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan**". (Subandi, hlm 3)

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Masih menurut Subandi, menyatakan bahwa : **kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha (bisnis), dengan pasar, transaksi jual-beli, dan pembayaran dengan uang. Secara sistematis kegiatan ekonomi dapat dibedakan antara kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi terhadap barang-barang dan jasa.**

Dalam kaitan ini, tentunya terjadi ekspor dan impor dalam interaksinya dengan negara-negara lain.

Dalam **Wikipedia Online**:

**"Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain". (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor>, diakses Mei 2019)**

Sedangkan impor dalam **Wikipedia Online**:

**"Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar**

**umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional".** (<http://id.wikipedia.org/wiki/Impor>, diakses Mei 2019)

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0% tah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet.

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses Mei 2019)

Pemerintah melihat disitulah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Namun demikian, pemerintah juga tetap memberikan kesempatan berkembang bagi usaha besar, baik swasta maupun BUMN. Karena kehadiran mereka juga sangat dibutuhkan untuk ikut menumbuh-kembangkan si kecil, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak, yaitu mencapai 48,9 juta unit atau 99,98 persen dari seluruh pelaku bisnis yang ada (BPS,2006). Bukan karena jumlahnya yang besar saja usaha mikro, kecil dan menengah ini perlu mendapatkan perhatian. Mereka juga secara nyata telah terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu sebesar 53,28 persen. Bahkan tidak kalah pentingnya dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 85,4 juta jiwa atau 96,18 persen dari total angkatan kerja yang ada. Demikian juga dari sebanyak 134.963 koperasi yang ada dengan 27,28 juta orang anggota merupakan aset yang harus terus dikembangkan guna ikut berperan lebih besar lagi ke depan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

Keberadaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah telah dirasakan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ketika itu, tatkala perbankan nasional dan pelaku usaha besar banyak yang gulung tikar, karena tingginya ketergantungan kepada pinjaman luar negeri, ekonomi nasional berhasil diselamatkan oleh kehadiran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha yang menghidupi bahagian terbesar rakyat Indonesia ini tetap tegar menghadapi badai krisis ekonomi karena tidak banyak ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan bahkan justru sebagian dari mereka menikmati adanya dampak dari krisis ekonomi terutama yang berorientasi pada pasar luar negeri atau ekspor. ( I Wayan Dipta. *Strategi penguatan.*)

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ini (AFTA), tentunya para pelaku ekonomi nasional, termasuk UMKM memiliki peran yang sangat penting karena sebagai salah satu faktor utama pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor non-migas dan sebagai industri pendukung yang dapat membuat komponen-komponen dan *spare parts* untuk usaha besar lewat keterkaitan produksi. Sedangkan diketahui bahwa dalam perdagangan bebas (AFTA) produk yang dijual kuantitas dan kualitasnya tentu jauh lebih baik dan memenuhi standar internasional, mengingat produktivitas UMKM Indonesia belum dikembangkan sepenuhnya.

Dengan demikian, untuk menghadapi perdagangan bebas kawasan asean ini, para pelaku ekonomi nasional indonesia khususnya perdangan komoditas Hortukultura perlu ditingkatkan lebih baik lagi, lebih terarah dan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar siap bersaing di arena pasar bebas asia tenggara (AFTA). Tentunya pemerintah indonesia maupun para pelaku

ekonominya, khususnya perdagangan hortikultura indonesia perlu menyiapkan strategi-strategi agar siap bersaing dalam AFTA.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Jika pengaruh AFTA dapat diimplementasikan dengan baik melalui pemerintah Indonesia, maka perdagangan komoditas hortikultura indonesia di pasar bebas asia tenggara akan mengalami peningkatan .**

### 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

**Tabel 1**  
**Pengaruh ASEAN Free Trade Area Terhadap Posisi Indonesia di Arena Pasar Bebas Asia Tenggara**

| <b>Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)</b>   | <b>Indikator (empirik)</b>                             | <b>Verifikasi (data)</b>  |
|--|--|---|
| Variabel Bebas:<br><b>Jika pengaruh AFTA dapat diimplementasikan dengan baik melalui</b> | Peran AFTA dalam meningkatkan perdagangan Hortikultura | <b>Data dan Fakta:</b> enam negara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, menyetujui diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA).<br>Banyak perkembangan yang telah terjadi selepas pemberlakuan AFTA tersebut. Dilihat dari dimensi keanggotaan, kini AFTA telah |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>pemerintah</b></p> <p><b>Indonesia</b></p>   |   | <p>meliputi seluruh negara anggota ASEAN. Vietnam bergabung di tahun 1995, disusul oleh Laos dan Myanmar di tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. Dari segi pengurangan tarif, AFTA melalui skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) telah berhasil mengurangi tarif setidaknya 95% seluruh barang di daftar Inclusive List (IL) sampai ke kisaran 0-5%, dengan banyak barang lain di enam negara awal yang tarifnya hanya tersisa 1%. Dari segi nilai ekspor intra-ASEAN telah melonjak 311,86% pada periode 1995-2013</p> <p><b>Sumber:</b> (Bappenas 2014).</p>   |
| <p>Variabel Terikat:</p> <p><b>maka</b></p> <p><b>perdagangan</b></p> <p><b>komoditas</b></p> <p><b>hortikultura</b></p> <p><b>Indonesia di pasar</b></p> <p><b>bebas asia</b></p> <p><b>tenggara akan</b></p> <p><b>mengalami</b></p> <p><b>peningkatan .</b></p> | <p>1.Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik</p> <p>2.Terciptanya situasi politik dan keamanan serta kepastian hukum yang kondusif</p> <p>3.Adanya perlindungan terhadap industri dalam negeri</p> | <p>Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas dan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia, transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing industri di pasar global. Industri menjadi sentral dalam transformasi karena industri merupakan lokomotif pertumbuhan menuju negara maju. Penyerapan banyak tenaga kerja dapat menciptakan nilai tambah dalam perekonomian yang pada akhirnya dapat menjadi sumber devisa secara fundamental</p> <p>4.Ekspor (per komoditas HS/SITC, per negara), Impor (per komoditas HS/SITC, per negara, revealed comparative advantage, konten teknologi ekspor, product</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Meningkatnya jumlah angka ekspor pertanian</p> | <p>sophistication, tariff, non tariff barriers, dan lain-lain</p> <p>sumber : World Integrated Trade Solution (WITS), World Bank.</p> <p>5.Populasi, PDB, Suku bunga pinjaman riil, aksespendanaan, bandwidth internet, konsumsi listrik, logistik, dan lain-lain</p> <p>Sumber : World Development Indicators (WDI), World Bank.</p> <p>6.Global competitiveness</p> <p>Sumber : World Economic Forum</p> <p><a href="https://fajar.co.id/2019/04/13/meningkatnya-ekspor-pertanian-dan-ntp-indikator-keberhasilan-sektor-pertanian/">https://fajar.co.id/2019/04/13/meningkatnya-ekspor-pertanian-dan-ntp-indikator-keberhasilan-sektor-pertanian/</a> diakses pada tanggal 06 bulan oktober 2019</p> |
|--|---|--|

## 2.5 Skema Kerangka Teoritis



